CASCADING

VISI

Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat

MISI

Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.

Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

TUJUAN

Terwujudnya peningkatan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, serta perlindungan tenaga kerja secara inklusif
Indeks Pemberdayaan Gender
Indeks Inklusi (GEDSI)
Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur
Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)
Indeks Kemiskinan Multidimensi
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

SASARAN

Meningkatnya Partisipasi Ketenagakerjaan Perempuan	**Meningkatnya Partisipasi Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas**	**Meningkatkan Rasio Pelatihan Tenaga Kerja terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja Bersertifikasi Serta Mendorong Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Manufaktur**	**Meningkatnya Tingkat Produktivitas Sumber Daya Manusia**	**Meningkatkan Keberdayaan Keluarga Miskin Dalam mendapatkan Akses Ketenagakerjaan**	**Meningkatnya perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan**	**Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan dan penyelesaian hubungan industrial yang adil dan inklusif**
Rasio Pencari Kerja Perempuan yang mendapatkan Pekerjaan di sektor formal dan informal	Rasio Pekerja Penyandang Disabilitas	Rasio Pelatihan Tenaga Kerja terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja Bersertifikasi	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio Pekerja dari Keluarga Miskin yang telah dijamin dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penerima Upah
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		Rasio Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Manufaktur	Rasio Penempatan kerja terhadap tenaga kerja dilatih			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
						Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial
						Rasio Perusahaan yang telah membayar gaji karyawan sesuai Upah Minimum

PROGRAM

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**
Presentase Pencari Kerja Perempuan Yang Diberi Pelatihan	Presentase pencari kerja perempuan yang di tempatkan	Presentase pencari kerja penyandang disabilitas yang di tempatkan	Rasio program pelatihan kerja yang sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Presentase pencari kerja yang ditempatkan di sektor manufaktur	Tingkat kematangan layanan ketenagakerjaan	Rasio pekerja yang mengalami peningkatan keterampilan atau pendidikan	Rasio pekerja berpendidikan tinggi terhadap total pekerja	Rasio program pelatihan keterampilan yang berkolaborasi dengan industri atau sektor tertentu	Realisasi pengajuan klaim jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja dari keluarga miskin	Persentase pencari kerja yang di tempatkan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan	Presentase pekerja yang menjadi peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan	Presentase pekerja yang terlindungi	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan
			Persentase Pencari Kerja dari Keluarga Miskin yang Diberi Pelatihan sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)							Persentase Pencari Kerja dari keluarga miskin yang ditempatkan				

KEGIATAN

PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	**PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI**	**PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI**	**PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK)**	**PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI**	**KONSULTANSI PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN KECIL**	**PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI**	**PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH**	**PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA**	**PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH**	**PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH**	**PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH**
Jumlah kegiatan Pelatihan Perempuan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah fasilitasi bagi pencari kerja perempuan	Jumlah fasilitasi pelayanan antar kerja bagi disabilitas	Jumlah kegiatan pelatihan kerja yang sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Jumlah kegiatan pelatihan dari keluarga miskin yang sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Jumlah fasilitasi layanan antar kerja di sektor manufaktur	Jumlah data dan informasi ketenagakerjaan	Jumlah kegiatan pelatihan bagi pekerja	Jumlah fasilitasi konsultasi produktivitas perusahaan	Jumlah Mou atau PKS antara BLK dan perusahaan / industri	Jumlah perusahaan yang difasilitasi pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah fasilitasi pelayanan antar kerja	Jumlah data lowongan kerja	Jumlah fasilitasi layanan perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	Jumlah fasilitasi pelayanan antar kerja bagi keluarga miskin	Jumlah perusahaan yang difasilitasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan yang dilaksanakan	Jumlah fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	Jumlah perusahaan yang difasilitasi pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur gaji karyawan sesuai upah minimum

SUB KEGIATAN

PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	**PELAYANAN ANTAR KERJA**	**PELAYANAN ANTAR KERJA**	**PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI**	**PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI**	**PELAYANAN ANTAR KERJA**	**PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MAKRO**	**PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI**	**PELAKSANAAN KONSULTASI PRODUKTIVITAS KEPADA PERUSAHAAN KECIL**	**PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI**	**PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN**	**PELAYANAN ANTAR KERJA**	**PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**	**PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE**	**PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE**	**PENINGKATAN PELINDUNGAN DAN KOMPETENSI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)/PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)**	**PELAYANAN ANTAR KERJA**	**PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**	**PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN**	**PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN**	**PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN**
Jumlah tenaga kerja perempuan yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja perempuan yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi pelayanan ULD	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Jumlah tenaga kerja dari keluarga miskin yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL di sektor manufaktur	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/ Perusahaan Kerja	Jumlah CPMI atau PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Jumlah tenaga kerja dari keluarga miskin yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Jumlah tenaga kerja dari keluarga miskin yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Jumlah data dan informasi pekerja yang terdaftar seebagia peserta jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah data dan informasi jaminan sosial tenaga kerja	Jumlah perselisihan yang dicegah	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Jumlah data dan informasi sarana hubungan industrial dan pengupahan